

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau PT pada awalnya bernama atau dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* atau NV.⁷ *Naamloze* berarti tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi Perseroan Terbatas yaitu:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁹

Berdasarkan definisi perseroan terbatas yang diberikan oleh undang-undang, terdapat lima hal pokok yang menjadi karakteristiknya, yaitu:¹⁰

a. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT seperti organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal

⁷ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis. 2006. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*, Ed. Kedua, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, hal 111.

⁸ Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Alumni, hal 47.

⁹ pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Rajagrafindo, hal 8-13.

dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan).

- b. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian
Ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUH Perdata. Sebagai perjanjian “khusus” yang “bernama”, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT.
- c. Perseroan Harus Menjalankan Kegiatan Usaha Tertentu
Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan barang maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/laba.
- d. Perseroan Harus Memiliki Modal yang Terbagi ke dalam Saham-saham
Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri, lepas dari hak dan kewajiban para pemegang sahamnya dan para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta pendirian perseroan kepada Menteri, para pendiri telah harus menempatkan dan menyetorkan sekurang-kurangnya 25% dari seluruh modal dasar yang diambil bagian oleh para pendiri.
- e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup.

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2

(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

Indonesia. Bila pendirian perseroan terbatas tidak dilakukan dengan akta notaris, akan diancam batal demi hukum.¹¹

Para pemegang saham atau pendiri mempunyai tanggung jawab yang terbatas setelah perseroan disahkan oleh Menteri. Artinya perseroan yang didirikan sudah mempunyai atau memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri. Namun apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan berstatus badan hukum, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu:¹²

- a. perbuatan hukum para pendiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat yang timbul.
- b. perbuatan hukum pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, asalkan perseroan:
 - 1) secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau oleh orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, dengan pihak ketiga;
 - 2) secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
 - 3) mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Segera setelah perseroan terbatas memperoleh pengesahan dan berstatus badan hukum, maka perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS pertama. RUPS pertama ini bertujuan untuk:¹³

- a. menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;
- c. mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

¹¹ Rachmadi Usman, *Op cit.*, hal 57.

¹² I.G. Rai Widjaya(a). 2005. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, hal 12.

¹³ Gunawan Widjaja(b). 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, hal 17.

3. Anggaran Dasar

Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan terbatas disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁴

Adapun hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan adalah:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan undang-undang;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham bila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta wewenang dan kewajibannya;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang, antara lain:
 - 1) memuat sebagai Perseroan Terbatas terbuka atau tertutup;
 - 2) menetapkan klasifikasi saham;
 - 3) cara pemindahan hak atas saham dan pembatasan pemindahan hak atas saham;
 - 4) penggantian Direksi dalam hal Direksi tidak berwenang lagi;
 - 5) penambahan modal dan pengurangan modal;
 - 6) ketentuan penggadaian saham atas nama;
 - 7) cara pengambilan keputusan RUPS selain dari rapat (misalnya secara tertulis).¹⁵

Nama perseroan terbatas harus didahului dengan perkataan

“Perseroan Terbatas” atau disingkat PT. Artinya perkataan PT harus

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Opcit.*, hal 29.

¹⁵ Hardijan Rusli. 1997. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar, hal 65-66.

diletakkan di depan nama perseroan dan hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UUPT. Khusus bagi perseroan terbuka, selain berlaku ketentuan tersebut, pada akhir nama perseroannya ditambah dengan singkatan kata “Tbk”.¹⁶

Status badan hukum dari perseroan menjadi hapus bila suatu perseroan bubar. Suatu perseroan dapat bubar atau tidak menjadi badan hukum lagi oleh karena:

- a. Keputusan RUPS;
- b. Jangka waktu berdirinya berakhir;
- c. Penetapan Pengadilan

Perseroan tidak menjadi badan hukum lagi bersamaan dengan bubarnya perseroan dan sejak saat itu berarti perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi atau pemberesan. Setelah perseroan bubar maka dalam waktu 30 hari, likuidator atau pemberes wajib melakukan:

- a. pendaftaran pembubaran dalam daftar perusahaan;
- b. pengumuman dalam Berita Negara dan dua surat kabar harian;
- c. memberitahukan kepada Menteri.¹⁷

Dalam perseroan terbatas modal dibagi dalam tiga pengertian yaitu Modal Dasar (*Statutaire Capitaal/Statute Capital*), Modal Ditempatkan (*Geplaats Capitaal/Authorised Capital*) dan Modal Disetor (*Gestort Capitaal/Paid Capital*).

¹⁶ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 71.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Opcit.*, hal 44.

Modal perseroan terbatas terbagi atas saham-saham dan setiap saham diberi nilai nominal. Nilai nominal saham ini wajib dicantumkan dan harus dalam rupiah, dalam sistem UUPT 2007 tidak dikenal adanya saham tanpa nilai nominal, kecuali dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁸

Perseroan terbatas yang sudah berstatus badan hukum apabila hendak melakukan perubahan anggaran dasar, tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hanya menghadap kepada notaris saja, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu. Pasal 19 UUPT menentukan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang didahului oleh panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicanrumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Ini berarti kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada di tangan RUPS.¹⁹

Terdapat dua macam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yaitu perubahan anggaran dasar tertentu dan perubahan lainnya. Perubahan tertentu tersebut meliputi:

a. nama perseroan;

¹⁸ Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 56.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 77.

- b. maksud dan tujuan perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor;
- f. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.²⁰

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas akan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.

Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Menteri.²¹ Sedangkan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang hanya cukup diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Menteri dapat menolak permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dengan pemberitahuan tertulis dan disertai alasan penolakannya dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima, yaitu apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan;
- c. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.²²

4. Organ Perseroan Terbatas

- a. Organ Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan

²⁰ I.G. Rai Widjaya(a), *Opcit.*, hal 21.

²¹ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 79.

²² I.G. Rai Widjaya(a), *Opcit.*, hal 22.

Komisaris.²³ Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh didalam badan hukum PT, menjalankan roda kegiatan PT ke arah visimisinya. Kegiatan organ-organ tersebut meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

b. Organ Perseroan Terbatas, menurut teori:

Sebagaimana telah dimafhumi bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Ketiga organ ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya. Direksi adalah merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.²⁴

Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke, "Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein (1954), langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum."²⁵

Bertitik tolak dari pendapat ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi PT itu bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. Kapan PT memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT adalah "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

²³ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

²⁴ M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 225.

²⁵ Nindyo Pramono. 2007. *Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, 5(2): hal.15

Berikut akan diuraikan secara umum mengenai organ-organ Perseroan tersebut:

a. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

1) Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas

Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi (masing-masing Direktur), kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Direksi tidak mewakili pemegang saham secara individu dan tidak mengikat pemegang saham dengan pihak ketiga.²⁶

Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menentukan bahwa kewenangan mewakili Perseroan oleh Direksi adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar maupun keputusan RUPS. Maksudnya adalah kapasitas Direksi untuk mewakili Perseroan adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang. Dengan demikian, untuk bertindak mewakili Perseroan, Direksi tidaklah membutuhkan kuasa dari Perseroan sebab

²⁶ Gunawan Widjaja(b), *Opcit.*, hal 64

kuasa yang dimilikinya atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri jabatan Direksi berdasarkan undang-undang.²⁷

Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan seperti yang ditentukan pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila:

- a) terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b) anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Menghadapi hal demikian, menurut Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a) anggota direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan;
- b) dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- c) pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus

²⁷ M. Yahya Harahap, *Opcit.*, Hal. 349.

lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.²⁸

Fiduciary duty direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁹

- a) Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan atau sepengetahuan perseroan.
- b) Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan.
- c) Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri atau pihak ketiga.

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.³⁰

Sebagai organ perseroan yang melakukan perbuatan pengurusan dan perwakilan, direksi memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban direksi diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:³¹

- a) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan, antara lain:

²⁸ Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, hal 205.

²⁹ Chatamarrasjid. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 196-197.

³⁰ Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 82.

³¹ Anisitus Amanat. 1996. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 130-132.

- (1) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap;
 - (2) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
 - (3) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
 - (4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
 - (5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
 - (6) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;
 - (7) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan;
 - (8) Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- b) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS, antara lain:
- (1) meminta persetujuan RUPS jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
 - (2) meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
 - (3) menyampaikan laporan tahunan;
 - (4) menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
 - (5) menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
 - (6) pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
 - (7) menyelenggarakan panggilan RUPS;
 - (8) meminta persetujuan RUPS jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan;
 - (9) menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya; dan
 - (10) mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Direksi tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Hak-hak tersebut adalah:³²

³² Anisitus Amanat, *Opcit.*, hal 133.

- a) hak untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- b) hak untuk memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa tersebut;
- c) hak untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d) hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau dewan komisaris;
- e) hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar.

2) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. UUPT tidak membatasi masa jabatan anggota direksi perseroan, tetapi ditentukan bahwa anggota direksi diangkat untuk waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Persyaratan pengangkatan direksi untuk jangka waktu tertentu dimaksudkan agar anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatan semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut.

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri. Pemberitahuan itu disampaikan untuk dicatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Pemberitahuan tersebut tidak

termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.³³

Pasal 105 UUPT menentukan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS, atau tanggal keputusan pemberhentian anggota direksi yang dilakukan dengan *circular resolution*, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam *circular resolution*.³⁴

Anggota direksi juga dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris ini didasarkan pada rasio bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. Untuk itu dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris harus menyebutkan alasannya. Kemudian pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.

³³ pasal 94 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

³⁴ pasal 105 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

Anggota direksi yang telah diberhentikan sementara oleh dewan komisaris tersebut tidak berwenang melakukan tugas menjalankan pengurusan perseroan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus diselenggarakan RUPS. RUPS disini harus didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan organ perseroan yang melakukan pemberhentian sementara itu, yaitu dewan komisaris. RUPS memiliki alternatif untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara. Apabila dalam jangka waktu 30 hari lewat, RUPS tersebut tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu batal.³⁵

3) Pertanggungjawaban Direksi

a) Pertanggungjawaban Pribadi Direksi

Apabila anggota direksi terdiri atas dua orang atau lebih, harus dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan perseroan diantara anggota direksi tersebut. Menurut pasal 92 (5) UUPT pembagian tugas dan wewenang dimaksud, ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Akan tetapi, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.³⁶

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah

³⁵ pasal 106 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

³⁶ M. Yahya Harahap, *Opcit.*, hlm 353.

atau lalai menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut dengan pengecualian bila ada direktur yang dapat membuktikan bahwa:

- (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.³⁷

Perkembangan hukum perseroan menunjukkan bahwa dalam kepailitan, direksi tidak lagi bertanggung jawab kepada perseroan dan pemegang saham semata-mata, melainkan kepada kreditor perseroan. Hak gugat perseroan terhadap direksi yang melakukan pelanggaran, dalam bentuk kesalahan atau kelalaian atau perbuatan yang mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada perseroan juga selanjutnya diberikan kepada kreditor, manakala perseroan berada dalam kepailitan.³⁸

b) Tindakan *Ultra Vires*

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires*

³⁷ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 23-24.

³⁸ Gunawan Widjaja(b), *Opcit.*, hal 76

apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.³⁹

Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria:

- (1) perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
- (2) dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
- (3) dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.⁴⁰

Menurut hukum Indonesia, sesuai dengan konsep *civil law*, dalam hal terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum yang dilakukan tidaklah menjadi batal. Perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada perseroan, melainkan dengan tanggung jawab pribadi dari direktur yang bersangkutan, demikian hanya bisa menuntut kepada direktur pribadi yang bersangkutan.⁴¹

c) *Business Judgement Rule*

Business Judgement Rule atau disingkat BJR merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi pengurus perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai

³⁹ Gunawan Widjaja(a). 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 23

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 228

⁴¹ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 26

dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya.⁴²

Aturan BJR didasarkan pada konsepsi bahwa direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya. Direksi selama dalam mengambil keputusannya, direksi tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (*self-dealing*) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi (*personal interest*) dan telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan itikad baik.⁴³

Setiap pihak yang menyangkal, meragukan, mempertanyakan keputusan yang diambil oleh direksi perseroan wajib untuk membuktikan terlebih dahulu apakah keputusan yang diambil tersebut telah dilakukan dengan cara:

- (1) tidak memenuhi proses, tata cara atau prosedur yang diwajibkan;
- (2) tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan dan para *stakeholders*nya, yaitu bahwa keputusan tersebut:
 - (a) diambil dengan kecurangan (*fraud*),
 - (b) mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) di dalamnya,
 - (c) terdapat unsur perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*),
 - (d) terjadinya kelalaian berat (*gross negligence*).⁴⁴

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi.⁴⁵

⁴² Gunawan Widjaja(a), *Opcit.*, hal 66

⁴³ *Ibid.*, hal 67

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 235

d) Sanksi dan Gugatan Derivatif

Apabila direksi melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka direksi tersebut dapat dikenakan sanksi, antara lain:

- (1) *injunction or declaration*, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* lebih lanjut;
- (2) *damages or compensation*, atau ganti rugi;
- (3) *restoration of the company's property*, dalam bentuk pengembalian harta kekayaan perseroan yang telah diambil dan atau dimanfaatkan secara tidak sah;
- (4) *rescission of the contract*, yaitu pembatalan perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan direksi pribadi;
- (5) *account of profits*, yaitu penyerahan keuntungan yang diperoleh oleh anggota direksi tersebut sebagai akibat tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri kepada perseroan;
- (6) *summary dismissal*, yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota direksi sebagai karyawannya;
- (7) *expropriation of member's property*, yang hanya diterapkan atau diberlakukan dalam hal terdapat *fraud on minority*, yaitu yang merugikan kepentingan minoritas dalam perseroan.⁴⁶

Terhadap kerugian yang diderita perseroan baik pelanggaran kewajiban *fidusia*, *ultra vires* maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif terhadap anggota direksi tersebut. Dikatakan derivatif (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.⁴⁷

⁴⁶ Gunawan Widjaja(a), *Opcit.*, hal 72

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 235-236

Harta kekayaan perseroan juga adalah harta kekayaan pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak derivatif tersebut kepada pemegang saham perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.⁴⁸

b. Dewan Komisaris

1) Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas

Dewan Komisaris berdasarkan pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh pasal 108 UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,

⁴⁸ Gunawan Widjaja(a), *Opcit.*, hal 76.

dan tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.⁴⁹

Dewan Komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.⁵⁰ Namun untuk Perseroan yang mempunyai kriteria tertentu, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Perseroan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat,
- b) Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau
- c) Perseroan Terbuka.⁵¹

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT, yaitu:⁵²

- a) Dewan Komisaris merupakan badan pengawas yang selain mengawasi tindakan direksi, juga mengawasi perseroan secara umum.
- b) Dewan Komisaris merupakan badan independen, dimana dewan komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan dewan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 241.

⁵⁰ Gunawan Widjaja(a), *Opcit.*, hal 79.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Opcit.*, hal 441.

⁵² Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 244-245.

- c) Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen, sehingga meskipun dewan komisaris merupakan pengambil keputusan, tetapi pada prinsipnya pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.
- d) Dewan Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi, dikarenakan jika kewenangan tersebut diberikan kepada dewan komisaris maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan dewan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:
 - (1) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi
 - (2) Memberhentikan direksi untuk sementara
 - (3) Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan
- e) Dewan Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, hal ini sebagai konsekuensi dari kedudukan dewan komisaris yang independen maka dewan komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, namun RUPS dapat memberhentikan dewan komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris juga mempunyai beberapa kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 116 UUPT. Kewajiban dewan komisaris meliputi:⁵³

- a) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- b) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, atau
- c) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

2) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan pasal 111 UUPT, anggota dewan komisaris hanya dapat diangkat RUPS. RUPS

⁵³ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 246.

merupakan satu-satunya organ di dalam perseroan yang memiliki hak untuk mengangkat anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris itu diangkat untuk jangka waktu tertentu. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut.

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi.⁵⁴

Pasal 112 UUPT menentukan bahwa pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas batal karena hukum sejak saat anggota dewan komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya

⁵⁴ pasal 111 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 17 hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota dewan komisaris tersebut untuk dan atas nama dewan komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.⁵⁵

Pasal 119 UUPT menentukan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 UUPT mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris, bahwa anggota dewan komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota dewan komisaris dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota dewan komisaris dilakukan dengan keputusan diluar RUPS (*circular resolution*), anggota dewan komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut.

Pemberhentian anggota dewan komisaris berlaku sejak ditutupnya

⁵⁵ pasal 112 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

RUPS, atau tanggal keputusan pemberhentian anggota dewan komisaris yang dilakukan dengan *circular resolution*, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam *circular resolution*.⁵⁶

3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Sebagaimana dengan direksi, kepada dewan komisaris bukan saja diberikan wewenang, tetapi sebaliknya daripada itu diberi tanggung jawab dalam ia menjalankan tugasnya itu, antara lain:

- a) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan;
- b) Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi;
- c) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- d) Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab dewan komisaris tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.⁵⁷

Anggota dewan komisaris tidak pantas untuk dimintai tanggung jawab tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (5) UUPT, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan:

- a) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung, maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
- c) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian perseroan.⁵⁸

⁵⁶ pasal 119 jo pasal 105 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

⁵⁷ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 36

⁵⁸ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 36

Sebagaimana diatur dalam pasal 115 UUPT, dalam hal terjadi kepailitan yang mana kepailitan itu timbul disebabkan oleh kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi, dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng dengan anggota direksi berkewajiban untuk membayar kewajiban perseroan yang tidak cukup terlunasi oleh perseroan. Yang bertanggung jawab atas ini berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat selama lima tahun sebelum putusan pailit. Kecuali anggota dewan komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung, maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan;
- d) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kepailitan.⁵⁹

c. Rapat Umum Pemegang Saham

1) Kedudukan RUPS dalam Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.⁶⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan rapat yang

⁵⁹ *Ibid.*, hal 37

⁶⁰ pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai pemilik Perseroan, yang mana mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris.⁶¹

Pasal 1 butir 3 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Namun timbul teori bahwa kedudukan ketiga organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS itu tidaklah berjenjang ke bawah (*unter geordnet*) melainkan kedudukan ketiga organ itu sejajar (*neben*), artinya yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing dengan tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya agar terjadi *check and balance*, sebagai jaminan terciptanya pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).⁶²

Jika dideskripsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan RUPS dalam hubungannya dengan organ Perseroan lainnya adalah sebagai berikut:⁶³

- a) Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya.
- b) Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam

⁶¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi)*, Cet. Ke-7, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 144.

⁶² Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 41

⁶³ M. Yahya Harahap, *Opcit.*, hal 307-308

RUPS, dan semua pemegang saham menyetujui dalam RUPS tersebut.

- c) Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS.
- d) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan.
- e) Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui dalam pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan oleh perseroan.
- f) Menyetujui penambahan modal perseroan.
- g) Menyetujui pengurangan modal perseroan.
- h) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian.
- i) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris.
- j) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain.
- k) Menetapkan pembagian tugas dan pengelolaan perseroan antara anggota direksi.
- l) Mengangkat anggota direksi.
- m) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi.
- n) Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
- o) Memberikan persetujuan kepada direksi untuk:
 - (1) mengalihkan kekayaan perseroan, atau
 - (2) menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, persetujuan ini diperlukan apabila lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- p) Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan tersendiri kepada Pengadilan Niaga.
- q) Memberhentikan anggota direksi.
- r) menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi.
- s) Mengangkat anggota dewan komisaris.
- t) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris.
- u) Mengangkat komisaris independen.
- v) Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan.
- w) Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
- x) Memberi keputusan atas pembubaran perseroan.
- y) Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi.

2) Penyelenggaraan RUPS

Mengenai penyelenggaraan RUPS, pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengklasifikasikannya dalam dua bentuk yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan harus dilaksanakan dalam batas jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS lainnya atau dalam praktik biasa disebut RUPS luar biasa dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan Perseroan.

Dalam hal penyelenggara RUPS, Direksi diberikan wewenang untuk itu sesuai dengan penegasan pada Pasal 79 ayat (1) dimana penyelenggaraan RUPS sepenuhnya merupakan inisiatif Direksi. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS justru dilakukan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris seperti yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal tertentu, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b) Dewan Komisaris.
- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.⁶⁴

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

⁶⁴ Gunawan Widjaja(a), *Opcit.*, hal 52.

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

- a) dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang saham, maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b) dalam hal permintaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.⁶⁵ Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

- a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan

⁶⁵ *Ibid.*, hal 53.

keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuaidengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar; dan/atau
b) perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.⁶⁶

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.⁶⁷

3) Kourum RUPS

Mengenai kuorum diatur pada Pasal 86, 88, dan 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara garis besar besarnya kuorum tergantung dari materi acara yang dibicarakan dalam rapat yang meliputi mata acara biasa (ordinary agenda), mata acara mengubah anggaran dasar Perseroan, serta mata acara yang disebut dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rapat umum pemegang saham dengan mata acara biasa diatur dalam Pasal 86. Besarnya kuorum kehadiran RUPS adalah:

⁶⁶ Gunawan Widjaja(a), *Opcit.*, hal 53.

⁶⁷ *Ibid.*, hal 54.

- a) Sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, “hadir atau diwakili”,
- b) Apabila jumlah ini tercapai, RUPS untuk membicarakan mata acara atau agenda biasa, dapat atau sah dilangsungkan.

Selanjutnya kuorum untuk RUPS dengan mata acara perubahan AD diatur pada Pasal 88 ayat (1) dengan ketentuan bahwa:

- a) Paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan
- b) Keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Yang terakhir adalah kuorum untuk mata acara yang disebut pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mata acara tersebut meliputi; penggabungan Perseroan, peleburan Perseroan, pengambilalihan Perseroan, pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan. Kuorum tersebut meliputi:

- a) Paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS,
- b) Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Tentang seluruh ketentuan kuorum pada seluruh mata acara RUPS tersebut, sifatnya tidak mutlak.⁶⁸ Anggaran dasar Perseroan dapat menentukan kehadiran dan/atau persyaratan RUPS yang lebih

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Opcit.*, hal. 331-339.

besar. Selain itu, apabila pada setiap penyelenggaraan RUPS sesuai dengan mata acara tersebut tidak mencapai kuorum. Maka dimungkinkan oleh undang-undang untuk melaksanakan RUPS kedua dan ketiga pada tiap-tiap mata acara RUPS tersebut.

4) Pengambilan keputusan

Setiap pengambilan keputusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para pemegang saham mampu mengambil keputusan dengan suara bulat, maka pengambilan suara bulat yang dikedepankan. Artinya mekanisme voting baru akan dilaksanakan apabila langkah musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Mengenai risalah RUPS ini diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:⁶⁹

- a) Pembuatan Risalah RUPS bersifat imperatif. Artinya setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.
- b) Yang wajib menandatangani risalah RUPS adalah RUPS yang tidak dibuat dalam akta notaris. Yang dibebankan untuk menandatangani adalah ketua rapat atau paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan risalah ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah.
- c) Sedangkan untuk RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak disyaratkan ditandatangani. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris isinya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Opcit.*, hal 339-340.

sebagai akta autentik. Sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.

B. Tinjauan Umum Tentang RUPS

1. Pengertian RUPS

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam UU PT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁷⁰ Kehendak pemegang saham secara bersama-sama dijemakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, RUPS lazimnya diadakan paling sedikit sekali setahun dan selambat-lambatnya diselenggarakan 9 bulan setelah tahun buku yang bersangkutan lampau.⁷¹

⁷⁰ I.G. Rai Widjaya(b). 2005. *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, Jakarta: Kesaint Blanc, hal 257.

⁷¹ C.S.T. Kansil. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 66.

Selain RUPS dapat diadakan rapat setiap kali bila dianggap perlu oleh pengurus, komisaris atau pemegang-pemegang saham. Dalam Akte Pendirian dapat ditentukan secara bebas siapa-siapa yang berhak memanggil RUPS. Jika hal ini tidak ditentukan dalam akte, maka pada umumnya baik Pengurus maupun Komisaris berhak memanggil rapat tersebut. Setiap pemegang saham berhak mengunjungi RUPS. Ia dapat datang sendiri atau memberi kuasa tertulis kepada wakilnya atau orang lain.⁷²

2. Hak Suara dalam RUPS

Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa pemegang saham sebagaimana dimaksud diatas (pasal 71).⁷³

Mereka berhak untuk bicara dan mengeluarkan suaranya. Untuk menjaga jangan sampai seseorang mempunyai suara yang terbanyak sehingga dialah yang menentukan segala sesuatu dalam rapat itu, maka umumnya diadakan peraturan mengenai banyaknya suara yang dapat diberikan oleh tiap-tiap peserta yang menghadiri RUPS.

Pada umumnya diadakan peraturan mengenai banyaknya suara yang dapat diberikan oleh tiap-tiap peserta yang menghadiri RUPS sebagai berikut:⁷⁴

- a. Seseorang yang mempunyai 1-20 saham mempunyai 1 suara
- b. Seseorang yang mempunyai 21-40 saham mempunyai 2 suara
- c. Seseorang yang mempunyai 41-60 saham mempunyai 3 suara

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm 112.

⁷⁴ C.S.T. Kansil, *Opcit.*, hal. 67.

- d. Seseorang yang mempunyai 61-80 saham mempunyai 4 suara
- e. Seseorang yang mempunyai 81-100 saham mempunyai 5 suara
- f. Seseorang yang mempunyai 101 saham atau lebih mempunyai 6 suara.

Untuk menghindarkan diri dari peraturan tersebut, dengan maksud supaya mendapat suara lebih banyak, maka sering orang-orang mempergunakan apa yang disebut "*Stroman*" (orang kedokan), yaitu orang-orang yang diminta oleh yang mempunyai saham, supaya mereka ikut menghadiri rapat setelah mereka mendapat beberapa saham daripadanya, dengan perjanjian bahwa nanti pada rapat itu mereka harus memberi suara kepada apa yang disetujui oleh yang banyak saham itu.

Apabila tetap ketahuan, bahwa dalam suatu RUPS bekerja beberapa *Stroman*, maka keputusan yang diambil dalam rapat itu dianggap sebagai tidak sah.

Jelaslah bahwa munculnya *Stroman* disebabkan karena adanya pembatasan suara pada pemegang saham. Dalam praktek soal orang kedokan ini sukar sekali dihindari lebih-lebih dalam hal PT mengeluarkan saham-saham tunjuk (*aantoonder*) yang sama sekali tidak dapat diawasi.

Selanjutnya panggilan RUPS dilakukan oleh pengurus atau Komisaris dalam waktu lima hari, hari panggilan dan hari rapat tidak terhitung. Panggilan RUPS dilakukan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar di tempat di mana perseroan itu berkedudukan. Dalam panggilan itu diberitahukan juga acara rapat yang diadakan, atau setidaknya diberitahukan bahwa soal-soal yang akan dirundingkan dalam rapat dapat diperiksa di kantor perseroan.⁷⁵

⁷⁵ C.S.T. Kansil, *Opcit.*, hal. 67.

Rapat umum diadakan ditempat dimana perseroan berkedudukan yang disebut dalam akte pendirian. Mengenai hak suara terdapat prinsip utama bahwa setiap pemegang saham mengeluarkan paling sedikit satu suara. Lazimnya jumlah suara adalah sejumlah saham yang dimiliki, jika modal perseroan terbagi dalam saham-saham yang sama besar jumlahnya (jika tidak diadakan pembatasan suara bagi pemegang saham). Jika harga nominal saham tidak sama besarnya, maka pada umumnya jumlah suara setiap surat saham yang sekian kali besar daripada surat saham yang terkecil adalah sekian kali lebih besar daripada suara saham yang terkecil itu.⁷⁶

3. Hak dan Wewenang

Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas dan waktu yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995 dan atau Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.⁷⁷

4. Kedudukan dan Wewenang RUPS

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UUPT, bahwa RUPS mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada

⁷⁶ *Ibid.*, hal 68.

⁷⁷ I.G. Rai Widjaya(b), *Opcit.*, hal 257

Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan. Seperti telah diketahui di muka organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan masih banyak yang lainnya.⁷⁸

Di samping itu RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. RUPS berhak menanyakan kepada Direksi dan Komisaris tentang kebenaran laporan itu. Walaupun kewenangan yang dimiliki RUPS ruang lingkupnya luas, tetapi dibatasi oleh UUPT dan anggaran dasar perseroan.⁷⁹

5. RUPS tahunan dan RUPS lainnya

Ada dua macam RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) UUPT, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi. Undang-undang menentukan paling lambat laporan tahunan diselenggarakan enam bulan sesudah tahun buku. Dengan demikian RUPS tahunan dilakukan sebelum tanggal satu Juli setiap tahunnya. Dalam RUPS ini diharapkan semua dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan harus diajukan. Karena itu Direksi perlu mempersiapkan sebelum rapat dimulai, karena tugas tersebut dalam rangka tersebut dalam rangka memberikan pertanggungjawaban Direksi.⁸⁰

Sebelum lahirnya UUPT dalam praktik dikenal adanya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan kapan saja sesuai kebutuhan.

⁷⁸ Gatot Supramono. 2004. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, hlm 68.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 68-69.

Penyelenggaraannya dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah lebih kecil yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan (pasal 66 ayat (2) UUPT). Adapun caranya pemegang saham mengajukan permintaan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. Jika disetujui, maka dalam RUPS yang dibicarakan hanyalah masalah yang berkaitan dengan alasan yang tercantum dalam permintaan tersebut. Apabila Direksi dalam melaksanakan tugasnya menyimpang dari anggaran dasar perseroan, kemudian pemegang saham mengajukan permintaan mengadakan RUPS dan Direksi menolak, maka permintaan itu dapat diajukan kepada Komisaris. Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS berdasarkan pasal 68 ayat (2) UUPT.⁸¹

6. Tempat RUPS harus di Indonesia

Untuk melangsungkan RUPS, undang-undang mengharuskan rapat tersebut dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 64 ayat (2) UUPT). Meskipun tidak dijelaskan dalam undang-undang, keharusan RUPS dilaksanakan di dalam negeri ini dalam hubungannya dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang berkewarganegaraan RI wajar melaksanakan RUPS di negara sendiri. RUPS dapat dilaksanakan di kantor Pusat yang merupakan tempat kedudukannya atau dapat pula dilangsungkan di tempat perseroan melakukan usahanya. Mengingat tempat-tempat tersebut belum tentu dapat dipakai sebagai tempat

⁸¹ *Ibid.*, hal 69.

rapat, undang-undang memperbolehkan RUPS dilakukan di tempat lain asalkan telah ditetapkan dalam anggaran dasar.⁸²

7. Direksi sebagai penyelenggara RUPS

Walaupun namanya sudah jelas disebut Rapat Umum Pemegang Saham, namun para pemegang saham sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rapat dimaksud. Dalam hal ini sesuai undang-undang wewenang untuk menyelenggarakan rapat dimaksud. Dalam hal ini sesuai undang-undang wewenang diberikan kepada Direksi sebagai penyelenggara RUPS (pasal 66 ayat (1) UUPT). Sebagai penyelenggara, maka Direksi diwajibkan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan RUPS, seperti mempersiapkan gedung, memanggil para pemegang saham, menyediakan peralatan dan sebagainya. Kewenangan ini diberikan Direksi, karena Direksi sebagai pengurus perseroan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan termasuk menyelenggarakan RUPS.⁸³

Dalam hal ini disimpulkan beberapa hal berikut mengenai penyelenggara RUPS:⁸⁴

- a. direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
- b. penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat a dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak Suara yang sah, atau suatu jumlah yang kecil sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

⁸² Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 69-70.

⁸³ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 70.

⁸⁴ C.S.T. Kansil, *Opcit.*, hal 110.

c. permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat b diajukan kepada direksi atau komisari dengan surat tercatat disertai alasannya.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat b hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat c. Ketentuan ini dimaksud agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda (pasal 66).

8. Pengumuman sebelum pemanggilan

Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, perseroan diwajibkan memasang pengumuman tentang akan diadakan pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut dilakukan melalui surat kabar harian selambat-lambatnya empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS (pasal 70 UUPT). Pengumuman itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memberi usul kepada direksi yang tujuannya untuk menambah acara RUPS.⁸⁵

Usul penambahan acara RUPS kelihatannya akan tergantung kepada Direksi. Sudah tentu Direksi dituntut secara arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan usul tersebut. Diterima atau tidak, kiranya disertai alasan yang dapat diterima oleh semua pihak. Berhubung tugas memasang pengumuman itu merupakan kewajiban Direksi, maka harus dilaksanakan. Hanya sayangnya undang-undang tidak memberi sanksi terhadap Direksi, sehingga apabila tidak dilaksanakan tidak ada akibat hukumnya, maka timbul reaksi dari para pemegang saham berupa protes terhadap Direksi.⁸⁶

9. Cara pemanggilan RUPS

⁸⁵ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 71.

⁸⁶ *Ibid.*

Untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum rapat tersebut diadakan. Panggilan itu menurut undang-undang dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat. Undang-undang memang tidak melarang apabila panggilan RUPS tidak dilakukan dengan surat tercatat, walaupun demikian berdasarkan pasal 69 ayat (6) UUPT apabila pemanggilan tidak dengan surat tercatat dan kurang dari 14 hari keputusan tetap sah jika RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.⁸⁷

Dalam surat panggilan RUPS selain dicantumkan mengenai tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, juga diberitahukan tentang bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, bahan tersebut tersedia di kantor perseroan dan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham sejak hari dilakukan pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan. Ketentuan tentang pemanggilan RUPS dengan surat tercatat hanya berlaku bagi perseroan tertutup saja, sedangkan untuk perseroan terbuka pemanggilannya dilakukan dengan cara memasang panggilan melalui dua surat kabar harian (pasal 70 ayat (1) UUPT).⁸⁸ Kesimpulannya adalah:

- a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan.
- b. Pemanggilan RUPS dengan surat tercatat. Ketentuan untuk memastikan pemanggilan tersebut telah dilakukan dan ditunjukkan ke alamat pemegang saham.
- c. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 72.

- d. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan.⁸⁹

10. Pemanggilan yang dapat dilakukan komisaris

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi sudah merupakan kewajibannya. Dalam UUPT tampaknya pembentuk undang-undang telah memperhitungkan tentang adanya kemungkinan dalam rangka menyelenggarakan RUPS Direksi berhalangan atau terjadi pertentangan antara Direksi dengan perseroan, sehingga Direksi tidak dapat atau tidak bersedia melakukan pemanggilan rapat. Padahal terutama RUPS tahunan harus diselenggarakan setiap tahun dan waktu penyelenggaraan telah dibatasi oleh undang-undang.⁹⁰

Dalam hal ini agar RUPS tetap dapat dilaksanakan, UUPT memberi kesempatan pada perseroan untuk mengatur di dalam anggaran dasarnya. Adapun yang dikehendaki undang-undang, jalan keluarnya seperti disebutkan pasal 68 ayat (2) bahwa Komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS asalkan dalam anggaran dasar telah ditetapkan demikian. Akan menemui kesulitan jika dalam anggaran dasar tidak mengatur jalan keluarnya, Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS, apalagi RUPS tahunan penyelenggaraannya tertunda-tunda tentunya dapat mengakibatkan kehidupan yang tidak sehat bagi perseroan itu sendiri.⁹¹

11. Korum untuk RUPS

⁸⁹ C.S.T. Kansil. *Opcit.*, hal 111-112

⁹⁰ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 72.

⁹¹ *Ibid.*

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS adalah pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak suaranya tersebut. Untuk menghadiri RUPS, tidak ada keharusan pemegang saham datang sendiri, tetapi dapat pula diwakili oleh kuasanya. Satu saham mempunyai satu hak suara yang utuh. Saham yang dimiliki oleh perseroan sendiri dan saham yang dimiliki oleh anak perusahaan, semuanya tidak memiliki hak suara. Pihak perseroan maupun anak perusahaan selaku pemegang saham perseroan sendiri tidak mempunyai hak untuk menghadiri RUPS.⁹²

Korum adalah jumlah minimum jumlah anggota yang harus hadir dalam rapat, agar dapat mengesahkan suatu putusan. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-undang (UUPT) atau Anggaran Dasar menentukan lain. Penyimpangan atas ketentuan tersebut hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh UUPT.⁹³

Anggaran Dasar tidak boleh menentukan korum yang lebih kecil dari korum yang ditentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1995 atau UUPT. Jika korum atau jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat tersebut tidak tercapai, maka diadakan RUPS kedua. Karena panggilan RUPS ini sebagai akibat dari tidak tercapainya korum dalam RUPS pertama, maka acara RUPS kedua harus sama seperti acara RUPS

⁹² Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 73.

⁹³ I.G. Rai Widjaya(b), *Opcit.*, hal 262.

pertama dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.⁹⁴

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.⁹⁵ Apabila korum tersebut tidak tercapai juga, maka menurut dari Pasal 73 ayat (3) UUPT memberi petunjuk bahwa untuk kepentingan tersebut perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum pada RUPS berikutnya.⁹⁶

Dengan persoalan yang dibawa ke pengadilan, ada kemungkinan korum yang ditetapkan pengadilan adalah RUPS dihadiri pemegang saham minimal di bawah $\frac{1}{3}$ atau minimal sejumlah yang hadir pada RUPS kedua, karena jumlah yang hadir pada RUPS kedua dapat dipandang akan dapat menghadiri RUPS berikutnya.⁹⁷

Khusus untuk mengubah anggaran dasar, korum yang harus dicapai adalah RUPS dihadiri pemegang saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara tersebut. Namun apabila korum tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ I.G. Rai Widjaya(b), *Opcit.*, hal 262

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 73.

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut (Pasal 75 UUPT).⁹⁸

12. Penggunaan laba bersih dalam RUPS

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat a diputuskan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan ini RUPS dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk direksi dan komisaris, bonus karyawan, cadangan sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha perseroan.

Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat a dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Setelah 5 (tahun), dividen yang tidak diambil dimasukkan kedalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu. Pengambilan dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam anggaran dasar (pasal 62).⁹⁹

13. Keputusan RUPS

Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan, namun musyawarah untuk mufakat juga tidak bisa tercapai maka keputusan RUPS

⁹⁸ *Ibid.*, hal 74.

⁹⁹ C.S.T. Kansil. *Opcit.*, hal 109.

dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.¹⁰⁰ Dalam RUPS, pada Pasal 74 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali undang-undang ini dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

Namun, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu perseroan, UUPT atau anggaran dasar menetapkan suatu suara terbanyak yang lebih mendasar daripada suara biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) atau suara terbanyak khusus (*qualified/special majority*). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak lebih dari setengah dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{5}$ dan sebagainya. Jadi, untuk kepentingan seperti perubahan modal karena sudah menyangkut hal yang mendasar bagi perseroan, maka keputusan berdasarkan suara terbanyak diatur secara khusus dalam anggaran dasar.¹⁰²

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh RUPS. Maksud dari pembuatan risalah dengan penandatanganan tersebut dimaksudkan adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Kalau risalah tersebut dibuat oleh

¹⁰⁰ I.G. Rai Widjaya(b), *Opcit.*, hal 263.

¹⁰¹ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 74.

¹⁰² Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 75.

Notaris maka kewajiban untuk menandatangani tersebut tidak diperlukan.¹⁰³

Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat, yaitu keputusan yang diambil dengan cara dengan cara mengirimkan dengan cara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan dan usul tersebut.¹⁰⁴

Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit dari 2/3 bagian dari jumlah tersebut. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut (pasal 75).¹⁰⁵

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran Perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut (pasal 76).¹⁰⁶

¹⁰³ .I.G. Rai Widjaya(b), *Opcit.*, hal 264.

¹⁰⁴ I.G. Rai Widjaya(b), *Opcit.*, hal 265.

¹⁰⁵ C.S.T. Kansil. *Opcit.*, hal 115.

¹⁰⁶ *Ibid.*

14. Risalah RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.¹⁰⁷

Selaku penyelenggara RUPS, Direksi mempunyai kewajiban membuat risalah RUPS (Pasal 86 ayat (1) UUPT). Rekaman tulisan tentang jalannya acara dan hasil rapat tersebut disimpan di kantor pusat perseroan sebagai dokumen. Risalah itu merupakan dokumen penting bagi perseroan karena memuat hasil RUPS yang wajib dilakukan Direksi. Jika Direksi berhalangan menyelenggarakan RUPS, maka yang menyelenggarakan RUPS adalah Komisaris. Kemudian jika Komisaris berhalangan, RUPS dapat diselenggarakan oleh pemegang saham setelah mereka mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan RUPS (Pasal 67 UUPT).¹⁰⁸

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:

- a. Ketua Rapat
- b. Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 75-76

Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga notaris dalam hal ini menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik.

Berpedoman pada Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dengan bunyi:

- a. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
- b. Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris.

Maka, risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu :

- a. Secara di bawah tangan (*underhand*) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan.

Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisa disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegang saham

Perseroan Notulen/Risalah RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.

- b. Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.

Notulen/Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPT.

15. Peranan Pengadilan pada kemacetan penyelenggaraan RUPS

Cara pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar mereka (pemegang saham) diberi izin untuk melakukan pemanggilan RUPS (Pasal 67 UUPT).¹⁰⁹

- a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan, atau
- b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Dalam perkara permohonan, Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UUPT, hakim bersifat aktif. Tanpa terikat UUPT dan anggaran dasar perseroan, hakim dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat. Keaktifan hakim tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) R.Bg. tentang hakim tidak diperkenankan memutus perkara terhadap hak yang tidak dituntut atau

¹⁰⁹ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 76-77.

menjatuhkan putusan lebih dari yang dituntut, karena ini merupakan ketentuan umum. Sedangkan UUPT merupakan aturan khusus. Sesuai asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum.¹¹⁰

Penetapan hakim atas permohonan pemegang saham tentang RUPS ini bersifat final. Sesuai Pasal 67 ayat (4) UUPT, tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding dan kasasi. Dengan diucapkannya penetapan permohonan pemegang saham tersebut langsung penetapan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹¹¹

C. Tinjauan Hakim

Adapun beberapa dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
 - a. Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

¹¹⁰ Gatot Supramono. *Opcit.*, hal 78.

¹¹¹ *Ibid.*

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

2. Pasal 1917 KUHPerdara

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.